

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA PANANGKALAAN HULU KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Rip'an Hidayat¹, Arpandi², Anna Maryati³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: ripanhidayat258@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Efektivitas Program Bantuan Non Tunai (BPNT) di Desa Panangkalaan Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya Terdapat beberapa permasalahan dalam Efektivitas Program Bantuan Non Tunai (BPNT) di Desa Panangkalaan, antara lain: Pertama, tidak akuratnya pendataan dalam DTKS. Kedua, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Ketiga ketidakjelasan jadwal penyaluran bantuan. Keempat, lemahnya pengawasan dalam proses distribusi. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebanyak 13 informan dipilih secara purposive sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil Penelitian Efektivitas Program Bantuan Non Tunai (BPNT) di Desa Panangkalaan Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang efektif. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, yaitu: *Pertama*, aspek Ketepatan Sasaran Program yaitu pada indikator ketepatan sasaran cukup efektif dan indikator ketepatan waktu belum efektif. *Kedua*, aspek Sosialisasi Program yaitu pada indikator penyampaian informasi dan pemahaman program kurang efektif. *Ketiga*, aspek Tujuan Program, yaitu pada indikator keberhasilan program sudah efektif dan indikator komitmen cukup efektif. *Keempat*, aspek Pemantauan Program yaitu pada indikator pengawasan program dan evaluasi program kurang efektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program BPNT di Desa Panangkalaan Hulu, yaitu: Faktor pendukung meliputi kerja sama antar pihak, mayoritas penerima tergolong tepat sasaran, dan adanya komitmen pemerintah. Sedangkan faktor penghambat adalah masih adanya penerima yang sudah mampu, keterlambatan penyaluran, kurangnya sosialisasi, dan lemahnya pengawasan. Saran agar meningkatkan perbaikan menyeluruh mulai dari pemutakhiran data secara berkala, peningkatan koordinasi antar-instansi, sosialisasi yang lebih merata, hingga partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung jalannya program secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas, BPNT, Desa

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the Non-Cash Assistance Program (BPNT) in Panangkalaan Hulu Village, North Amuntai District, North Hulu Sungai Regency and to determine the factors that influence it. There are several problems in the effectiveness of the Non-Cash Assistance Program (BPNT) in Panangkalaan Village, including: First, inaccurate data collection in the DTKS. Second, lack of socialization to the community. Third, unclear aid distribution schedule. Fourth, weak supervision in the distribution process. This study uses a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. A total of 13 informants were selected purposively according to the research objectives. Data analysis was carried out through the stages of data condensation, data presentation, and drawing and verifying conclusions. The results of the study show that the effectiveness of the Non-Cash Assistance Program (BPNT) in Panangkalaan Hulu Village, North Amuntai District, North Hulu Sungai Regency is less effective. This can be seen from several indicators, namely: First, the aspect of Program Target Accuracy, namely the indicator of target accuracy is quite effective and the indicator of timeliness is not yet effective. Second, the aspect of Program Socialization, namely the indicators of information delivery and program understanding are less effective. Third, the aspect of Program Objectives, namely the indicator of program success is effective and the indicator of commitment is quite effective. Fourth, the aspect of Program Monitoring, namely the indicator of program supervision and program evaluation is less effective. The factors that influence the Effectiveness of the BPNT Program in Panangkalaan Hulu Village, namely: Supporting factors include cooperation between parties, the majority of recipients are classified as right on

target, and the existence of government commitment. While the inhibiting factors are the presence of recipients who are already capable, delays in distribution, lack of socialization, and weak supervision. Suggestions are to increase overall improvements starting from regular data updates, increased coordination between agencies, more equitable socialization, to active community participation in supporting the program in an appropriate and sustainable manner.

Keywords: *Effectiveness, BPNT, Village*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang krusial di Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan selama bertahun-tahun untuk mengatasinya, hingga kini Indonesia masih belum mampu sepenuhnya keluar dari jeratan kemiskinan. Suatu kelompok masyarakat dapat dikategorikan miskin apabila pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, dan tempat tinggal.

Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju dengan dukungan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah. Namun sayangnya, banyak masyarakat belum memiliki keterampilan yang memadai untuk mengelola SDA tersebut secara mandiri. Akibatnya, sebagian besar kekayaan alam yang ada justru dikelola oleh pihak asing. Kondisi inilah yang menyebabkan Indonesia, meskipun kaya akan potensi, masih termasuk dalam jajaran negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan didefinisikan sebagai kebijakan dan program yang dirancang oleh pemerintah pusat maupun daerah secara terencana dan sinergis dengan pelaku usaha serta masyarakat, guna menurunkan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

Salah satu program strategis yang dijalankan adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran pangan dan meningkatkan asupan gizi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pangan, sebagai kebutuhan dasar manusia, menjadi hak asasi yang harus dipenuhi setiap saat, karena berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional. Undang-Undang Republik Indonesia mendefinisikan pangan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang telah maupun belum diolah, yang dikonsumsi sebagai makanan atau minuman.

BPNT disalurkan dalam bentuk non-tunai melalui sistem uang elektronik, yang hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di e-Warong—toko elektronik gotong royong yang bekerja sama dengan bank penyalur. Program ini diatur dalam beberapa regulasi, antara lain Permensos No. 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), Perpres No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, dan Permensos No. 20 Tahun 2019 serta No. 25 Tahun 2016.

Diluncurkan pada Januari 2017, program BPNT membawa semangat efisiensi 5T: Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi. Sistem perbankan dalam program ini diharapkan mampu meningkatkan perilaku produktif masyarakat miskin serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan. Setiap KPM menerima bantuan senilai Rp110.000 hingga Rp200.000 per bulan, yang ditransfer langsung melalui kartu elektronik dan hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pokok seperti beras, minyak, gula, dan tepung di lokasi tertentu. Calon penerima program ditentukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dengan kriteria 25% rumah tangga termiskin di setiap wilayah pelaksana.

Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi salah satu Kabupaten yang menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai dengan jumlah penerima sebanyak 14.122 KPM. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini dilaksanakan dari tahun 2019. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Hulu Sungai Utara ini disalurkan melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong). EWarong adalah agen bank atau pihak lain yang bekerjasama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penyaluran bantuan.

Kecamatan Amuntai Utara merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menerima bantuan program BPNT. Bantuan pangan non tunai di Kecamatan Amuntai Utara sudah tersalurkan, namun masih ada ketidak sesuaian dengan indikator keberhasilan dan tujuan yang diharapkan dari Program BPNT. Salah satu yang menjadi fokus penelitian yang mendapat bantuan program ini adalah Desa Panangkalaan Hulu.

Desa Panangkalaan Hulu termasuk dalam penerima BPNT, berdasarkan data yang di peroleh dari aparat desa jumlah penerima BPNT di Panangkalaan Hulu ada 63 KPM. Ada beberapa faktor seperti kesalahan data penerima, penduduk yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat sebagai penerima program BPNT, serta status keluarga yang mengalami peningkatan atau penurunan menjadi sejahtera.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci fakta, kondisi, variabel, dan fenomena yang terjadi di lapangan, di mana data yang dikumpulkan berupa pernyataan tertulis maupun lisan dari para informan. Sebanyak tiga belas informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling untuk memperoleh data yang relevan. Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara oleh peneliti, sedangkan data sekunder diperoleh dari pihak lain seperti dokumen, arsip, media, dan informasi dari instansi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Hardani *et al.*, 2020). Untuk menjamin keabsahan data, digunakan uji kredibilitas yang sesuai dengan metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2023). Dengan demikian, data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung analisis mengenai efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Panangkalaan Hulu, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Panangkalaan Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu tujuan atau sasaran dapat dicapai dengan cara yang tepat dan hasil yang diinginkan tercapai secara efektif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan empat indikator efektivitas yang fokus pada teori dari Budiani dalam (Saputera dabrn Erni, 2024:44-45), adapun hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program adalah ukuran sejauh mana program BPNT berhasil menysasar dan menjangkau penerima manfaat yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai keluarga kurang mampu atau rentan secara ekonomi.

a. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran adalah suatu kondisi di mana program, kegiatan, atau bantuan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga tertentu tepat menjangkau pihak atau kelompok yang benar-benar berhak dan membutuhkan sesuai dengan tujuan awal program

tersebut. Ketepatan sasaran menunjukkan bahwa alokasi dan distribusi bantuan telah sesuai dengan kriteria, data, dan kebutuhan penerima manfaat, sehingga program dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa ketepatan sasaran dalam efektivitas program bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Desa Panangkalaan Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif. Program telah menjangkau sebagian besar masyarakat miskin dan rentan, namun masih perlu perbaikan dalam pembaruan data, mekanisme pengawasan, dan keterlibatan aktif masyarakat agar bantuan benar-benar diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan. Upaya peningkatan akurasi data dan transparansi dalam proses seleksi akan sangat menentukan keberhasilan program ini ke depannya.

b. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu program atau bantuan disalurkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, tanpa mengalami keterlambatan yang dapat mengganggu tujuan dan manfaat program tersebut. Dalam konteks program bantuan sosial seperti BPNT, ketepatan waktu berarti bahwa bantuan pangan diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara rutin dan tepat periode, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara berkelanjutan. Ketepatan waktu penting untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap program, mencegah kerentanan ekonomi, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa ketepatan sasaran dalam efektivitas program bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Desa Panangkalaan Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara belum efektif. Penyaluran bantuan belum memiliki jadwal tetap dan konsisten, serta masih sering mengalami keterlambatan yang berdampak pada ketidakpastian dan keresahan masyarakat. Walaupun bantuan tetap disalurkan dan jumlahnya tidak berkurang (karena dirapel), namun ketidakpastian waktu menjadi kendala dalam menjamin efektivitas dan keberlanjutan program. Oleh karena itu, perlu adanya penjadwalan resmi dan sistem pengawasan distribusi yang lebih baik serta peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah, agar bantuan tidak hanya tepat jumlah dan sasaran, tetapi juga tepat waktu.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program adalah proses penyampaian informasi dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya calon penerima manfaat, mengenai tujuan, mekanisme, prosedur, hak dan kewajiban, serta manfaat dari suatu program. Dalam konteks program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sosialisasi bertujuan agar masyarakat, terutama Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memiliki pemahaman yang jelas mengenai kriteria penerima, jadwal penyaluran, cara penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta peran lembaga pelaksana seperti e-Warong dan pendamping sosial.

a. Penyampaian Informasi

Penyampaian informasi adalah proses menyampaikan pesan, data, atau penjelasan terkait suatu program kepada pihak yang berkepentingan, terutama kepada penerima manfaat dan masyarakat umum, secara jelas, terbuka, dan mudah dipahami. Dalam konteks program BPNT, penyampaian informasi mencakup penjelasan mengenai tujuan program, kriteria penerima, jumlah bantuan, waktu penyaluran, serta prosedur pelaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi dalam efektivitas program bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Desa Panangkalaan Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang efektif. Meskipun terdapat upaya dari Dinas Sosial dan aparat desa dalam menyampaikan informasi melalui berbagai saluran seperti WhatsApp, rapat desa, hingga pengumuman langsung, namun penyampaian informasi tersebut belum dilakukan secara

merata, rutin, dan sistematis. Sosialisasi resmi hanya dilakukan satu kali dalam setahun, dan penyampaian informasi sering kali bersifat informal serta tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan masih adanya warga yang kurang memahami mekanisme, jadwal, dan kriteria penerima bantuan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan kecemburuan sosial antarwarga. Observasi di lapangan juga menunjukkan minimnya media informasi terbuka seperti papan pengumuman atau selebaran yang dapat diakses publik. Meskipun dokumentasi menunjukkan adanya rapat koordinasi antara pemerintah desa dan penerima bantuan, namun hal tersebut belum mampu mengatasi keterbatasan jangkauan dan pemahaman masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penyampaian informasi dalam program BPNT ini perlu ditingkatkan agar efektivitas program dapat tercapai secara optimal dan merata di seluruh masyarakat desa.

b. Pemahaman Program

Pemahaman program adalah tingkat sejauh mana penerima manfaat dan masyarakat secara umum mengerti, menyadari, dan memahami maksud, tujuan, mekanisme, serta manfaat dari suatu program yang dijalankan. Dalam konteks program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pemahaman program mencakup pengetahuan penerima manfaat terhadap tujuan bantuan, kriteria penerima, prosedur pencairan, jenis bantuan yang diberikan, dan peran lembaga pelaksana seperti e-Warong dan pendamping sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman program dalam efektivitas program bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Desa Panangkalaan Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang efektif. Meskipun aparatur desa dan pelaksana teknis memahami dengan baik tujuan dan mekanisme program karena adanya pelatihan dan sosialisasi dari Dinas Sosial, pemahaman masyarakat penerima manfaat masih terbatas. Mayoritas warga hanya mengetahui bahwa BPNT merupakan bantuan untuk keluarga miskin, namun tidak memahami secara menyeluruh mengenai prosedur pelaksanaan, jenis barang yang dapat dibeli, serta langkah-langkah yang harus dilakukan bila terjadi kendala. Kondisi ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program menjadi rendah, bahkan menimbulkan kecemburuan sosial serta ketidaktepatan sasaran penerima karena kurangnya pemahaman tentang pelaporan dan pemutakhiran data. Kurangnya edukasi berkelanjutan dan tidak meratanya informasi menjadi faktor utama lemahnya pemahaman masyarakat terhadap program ini.

3. Tujuan Program

Tujuan program adalah arah atau sasaran utama yang ingin dicapai melalui pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan tertentu. Dalam konteks program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tujuan program adalah untuk meningkatkan akses pangan masyarakat miskin secara berkelanjutan, melalui bantuan non-tunai yang lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien.

a. Keberhasilan Program

Keberhasilan program adalah ukuran sejauh mana suatu program mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam konteks program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), keberhasilan program dapat dilihat dari bagaimana program tersebut berkontribusi dalam meningkatkan akses pangan masyarakat miskin, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, serta mendorong kemandirian ekonomi melalui mekanisme non-tunai yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program dalam efektivitas program bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Desa Panangkalaan Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah efektif. Perlindungan hukum terlihat dari pendaftaran kelompok tani dalam Sistem

Informasi Program ini dinilai berhasil memberikan dampak nyata dalam mengurangi beban ekonomi rumah tangga masyarakat miskin melalui bantuan saldo non-tunai yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok di e-Warong. Para penerima manfaat merasakan langsung manfaat bantuan, terutama dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas gizi keluarga, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia dan janda. Hasil observasi menunjukkan bahwa proses penyaluran dan penggunaan bantuan dilakukan dengan tertib dan tepat sasaran. Hal ini membuktikan bahwa tujuan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra-sejahtera telah tercapai dengan baik, meskipun tantangan dalam hal validasi data masih perlu terus dibenahi.

b. **Komitmen**

Komitmen adalah bentuk kesungguhan, tanggung jawab, dan keterikatan moral maupun profesional dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program untuk menjalankan tugas dan kewajibannya secara konsisten dan berkelanjutan demi mencapai tujuan program. Dalam konteks program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), komitmen mencakup keseriusan pemerintah, pendamping sosial, e-Warong, serta masyarakat dalam menjaga kelancaran, ketepatan, dan keberhasilan program.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa komitmen dalam efektivitas program bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Desa Panangkalaan Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif. telah berjalan dengan cukup optimal. Informan dari tingkat kabupaten hingga pelaksana di desa menyatakan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, secara konsisten menunjukkan komitmennya melalui pengalokasian dana, pelaksanaan sosialisasi, dan pemantauan berkala terhadap proses penyaluran bantuan. Pihak aparat desa aktif dalam koordinasi dan memastikan keberlangsungan program dengan mengadakan rapat, menyampaikan informasi kepada masyarakat, serta melaporkan hasil evaluasi ke tingkat kecamatan. Bahkan pemilik e-Warong dan masyarakat penerima bantuan pun menyadari bahwa program tetap berjalan meskipun ada perubahan data atau jadwal pencairan, yang menjadi indikasi adanya upaya perbaikan berkelanjutan. Fenomena masalah seperti keterlambatan penyaluran yang dirapel dan ketidaktepatan data penerima memang masih ditemukan, tetapi hal tersebut tidak mengurangi komitmen yang telah ditunjukkan oleh seluruh pihak, melainkan mencerminkan tantangan administratif yang masih dalam proses pembenahan.

4. **Pemantauan Program**

Pemantauan Program adalah proses pengawasan dan pengumpulan data secara sistematis dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program BPNT untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan. Pemantauan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program memenuhi target, mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan, serta memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan dan pengambilan keputusan guna meningkatkan efektivitas program.

a. **Pengawasan Program**

Pengawasan Program dalam konteks penelitian tentang Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah proses kontrol yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana, aturan, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pengawasan program dalam efektivitas program bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Desa Panangkalaan Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang efektif. Meskipun secara administratif terdapat bukti adanya kegiatan monitoring oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), namun implementasi di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan secara menyeluruh dan

berkesinambungan. Pengawasan langsung terhadap proses distribusi bantuan, verifikasi data penerima, serta pemantauan aktivitas e-Warong masih jarang dilakukan dan belum terkoordinasi dengan baik. Hal ini mengakibatkan munculnya fenomena seperti ketidaktepatan sasaran bantuan, kurangnya transparansi, dan lemahnya tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat. Dengan demikian, meskipun terdapat komitmen pengawasan secara struktural, efektivitas pengawasan dalam praktiknya masih perlu diperkuat agar tujuan program BPNT dapat tercapai secara maksimal dan akuntabel.

b. Evaluasi Program

Evaluasi program dalam penelitian mengenai efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk menilai keberhasilan program dalam mencapai target yang telah ditetapkan, serta menelaah dampak, manfaat, dan berbagai kekurangan selama pelaksanaannya..

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi program dalam efektivitas program bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Desa Panangkalaan Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang efektif. Meskipun terdapat upaya evaluasi melalui rapat koordinasi dan pembaruan data, evaluasi tersebut lebih bersifat administratif dan kurang melibatkan penerima manfaat secara aktif. Ketidakhadiran agenda evaluasi terbuka dan tidak meratanya tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat menunjukkan lemahnya sistem evaluasi yang partisipatif. Sementara dokumentasi menunjukkan adanya rapat koordinasi sebagai bagian dari evaluasi, namun belum mencerminkan sistem evaluasi menyeluruh yang mampu menanggulangi persoalan keterlambatan penyaluran dan ketidaktepatan sasaran secara berkelanjutan.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pemberdayaan Efektivitas Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Panangkalaan Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dalam Efektivitas program bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Desa Panangkalaan Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak semulus yang di harapkan dan tentu memiliki hambatan atau kendala yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan program tersebut dan ada pula faktor yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Berikut Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas program bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Desa Panangkalaan Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung efektivitas adalah berbagai elemen atau kondisi yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu program, kebijakan, atau kegiatan. Faktor-faktor ini memiliki dampak positif dalam mendorong tercapainya hasil yang diharapkan.

a. Kerja sama antar pihak terkait

Kerja sama antar pemangku kepentingan merupakan bentuk sinergi dan koordinasi yang dibangun oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan suatu program guna mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan Program BPNT, kerja sama ini melibatkan Dinas Sosial, pemerintah desa, pendamping sosial, e-Warong, serta masyarakat sebagai penerima manfaat.

Faktor pendukung dalam efektivitas program bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Desa Panangkalaan Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi kerja sama antar pihak terkait, seperti Dinas Sosial, TKSK, aparat desa, pendamping sosial, dan masyarakat. Masing-masing pihak berperan aktif dalam proses pendataan, pengawasan, hingga penyaluran bantuan. Dinas Sosial dan TKSK melakukan pemantauan lapangan, sementara aparat desa menjalin koordinasi secara rutin untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pelaporan. Sinergi ini terbukti memperlancar pelaksanaan program dan meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap bantuan yang diberikan.

b. Mayoritas penerima bantuan tergolong tepat sasaran

Mayoritas penerima bantuan tergolong tepat sasaran berarti bahwa sebagian besar bantuan yang disalurkan dalam program BPNT sudah diterima oleh orang-orang yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai keluarga kurang mampu atau berhak menerima bantuan sesuai data dan ketentuan yang berlaku.

Faktor pendukung dalam efektivitas program bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Desa Panangkalaan Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi dari mayoritas penerima yang tergolong tepat sasaran. Proses verifikasi dan validasi data dilakukan dengan cermat oleh Dinas Sosial bersama aparat desa dan pendamping sosial. Meskipun terdapat beberapa ketidaktepatan, secara umum program telah menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan, yang memperkuat keberhasilan pelaksanaan program di tingkat desa.

c. Adanya Komitmen pemerintah

Komitmen pemerintah adalah kesungguhan dan konsistensi pemerintah dalam menjalankan, mendukung, serta menjaga keberlangsungan suatu program atau kebijakan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Faktor pendukung dalam efektivitas program bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Desa Panangkalaan Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program. Komitmen ini ditunjukkan melalui pelaksanaan yang konsisten, komunikasi yang terbuka, dan upaya memperbaiki data penerima secara berkala. Semua ini turut memperkuat keberhasilan pelaksanaan program dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bantuan yang diberikan.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam efektivitas merujuk pada elemen-elemen atau kondisi yang mengganggu, mengurangi, atau menghalangi tercapainya tujuan suatu program, kegiatan, atau kebijakan secara efektif. Faktor-faktor ini memiliki dampak negatif terhadap proses pelaksanaan dan hasil yang ingin dicapai, sehingga menyebabkan keterlambatan, kesalahan sasaran, rendahnya partisipasi, atau lemahnya hasil akhir.

a. Masih ada penerima yang sudah mampu

Masih ada penerima yang sudah mampu berarti bahwa dalam pelaksanaan Program BPNT, terdapat sebagian penerima bantuan yang sebenarnya tidak lagi memenuhi kriteria sebagai keluarga tidak mampu, namun tetap tercatat dan menerima bantuan.

Program BPNT di Desa Panangkalaan Hulu masih menghadapi tantangan pada aspek akurasi data penerima. Kurangnya pembaruan data secara berkala menyebabkan ketidaktepatan dalam penyaluran, yang dapat mengurangi efektivitas program secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembaruan dan verifikasi data secara rutin menjadi penting agar bantuan benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

b. Kondisi Lingkungan dan Alam yang Tidak Dapat di Prediksi

Adanya keterlambatan penyaluran adalah terjadinya penundaan atau tidak tepat waktunya proses distribusi suatu bantuan, dana, barang, atau sumber daya kepada pihak yang seharusnya menerima.

Program BPNT di Desa Panangkalaan Hulu masih menghadapi tantangan, meskipun sistem penyaluran bantuan telah berjalan, masih terdapat kendala administratif dan teknis yang menyebabkan keterlambatan pencairan. Hal ini berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi rumah tangga penerima bantuan yang sangat mengandalkan waktu pencairan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam hal manajemen penyaluran dan koordinasi antara pihak terkait agar bantuan dapat diterima masyarakat secara tepat waktu dan merata.

c. Kurangnya sosialisasi

Kurangnya sosialisasi berarti proses penyampaian informasi belum berjalan dengan baik atau belum mencapai semua pihak yang seharusnya menerima informasi tersebut, sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman.

Kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Panangkalaan Hulu, Kecamatan Amuntai Utara, menjadi salah satu kendala yang memengaruhi efektivitas program tersebut. Meskipun upaya penyampaian informasi telah dilakukan oleh pihak terkait, proses sosialisasi dinilai belum optimal dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi umumnya hanya dilakukan satu kali dalam setahun melalui kegiatan resmi, sedangkan komunikasi selanjutnya lebih bersifat informal, seperti melalui telepon atau pesan singkat yang diteruskan oleh kepala desa atau aparat kepada warga. Akibatnya, meskipun informasi disampaikan, banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh maksud, tujuan, dan mekanisme program.

d. Kurangnya pengawasan

Kurangnya pengawasan berarti tidaknya cukup pemantauan atau pengendalian dari pihak yang berwenang terhadap proses penyaluran bantuan, pelaksanaan teknis, serta penggunaan dana atau komoditas bantuan.

Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Panangkalaan Hulu, Kecamatan Amuntai Utara, menjadi salah satu kendala utama yang dirasakan oleh pelaksana maupun penerima bantuan. Meskipun program telah berjalan secara rutin, aspek pengendalian dan pemantauan dari pihak berwenang belum berjalan secara maksimal. Pengawasan dari pihak desa memang ada, namun pelaksanaannya dinilai masih minim, tidak rutin, dan kurang menyentuh pada aspek teknis distribusi di lapangan. Selama proses pembagian bantuan berlangsung, hampir tidak pernah terlihat adanya pengawasan langsung dari pihak pusat maupun daerah, termasuk dari instansi yang seharusnya berwenang dalam pengawasan program. Kehadiran aparat desa dan pendamping sosial dalam pemantauan pun sangat jarang terlihat, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan maupun dalam pemanfaatan bantuan oleh penerima. Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Program BPNT masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Diperlukan sistem pengawasan yang lebih aktif, menyeluruh, dan berkelanjutan, dengan melibatkan lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan agar integritas dan efektivitas program dapat terjaga, serta bantuan benar-benar tersalurkan kepada pihak yang berhak secara tepat dan transparan.

SIMPULAN

Dari hasil kegiatan penelitian tentang Efektivitas Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Panangkalaan Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang telah peneliti lakukan setidaknya dapat disimpulkan yaitu:

Efektivitas Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Panangkalaan Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang efektif. Hal ini dapat dinilai pada aspek pertama, Pertama, aspek Ketepatan Sasaran Program yaitu pada indikator ketepatan sasaran dalam efektivitas program bantuan pangan non tunai (BPNT) di desa panangkalaan hulu cukup efektif, namun masih ditemukan beberapa kasus di mana bantuan diterima oleh warga yang secara ekonomi sudah membaik. Hal ini mencerminkan bahwa pembaruan dan validasi data masih belum optimal. Sementara itu, indikator ketepatan waktu pelaksanaan program belum efektif karena sering terjadi keterlambatan penyaluran, khususnya di awal tahun, dan tidak adanya jadwal pencairan yang tetap.

Kedua, aspek Sosialisasi Program yaitu pada indikator penyampaian informasi kurang efektif. Meskipun informasi terkait tujuan, prosedur, jadwal, dan kriteria penerima telah disampaikan melalui berbagai saluran, penyampaiannya belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Sosialisasi

formal hanya dilakukan sekali dalam setahun dan selebihnya melalui komunikasi tidak langsung, sehingga masih terjadi kesalahpahaman dan indikator pemahaman program juga kurang efektif, meskipun di kalangan pelaksana teknis seperti Dinas Sosial, aparat desa, TKSK, dan agen e-Warong memahami, namun belum merata di kalangan penerima manfaat.

Ketiga, aspek Tujuan Program, yaitu pada indikator keberhasilan program sudah efektif. Program BPNT di Desa Panangkalaan Hulu telah memberikan dampak positif dalam meringankan beban ekonomi rumah tangga miskin, meningkatkan ketahanan pangan, dan kualitas gizi keluarga, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan janda. Penyaluran bantuan dilakukan secara tertib dan sebagian besar tepat sasaran. Indikator komitmen dinilai cukup efektif, ditandai dengan adanya keterlibatan aktif dari pemerintah pusat, daerah, hingga desa dalam menjalankan program, meskipun tantangan terkait pembaruan data penerima masih perlu diperbaiki.

Keempat, aspek Pemantauan Program yaitu pada indikator pengawasan program dinilai kurang efektif, karena pengawasan langsung di lapangan jarang dilakukan, tidak merata, dan belum ada sistem pemantauan yang intensif serta berkelanjutan. Sementara pada indikator evaluasi program juga dinilai kurang efektif, karena meskipun evaluasi seperti pembaruan data dan penilaian kinerja e-Warong dilakukan, pelaksanaannya bersifat administratif dan belum melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penilaian dan perbaikan program.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Panangkalaan Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdapat beberapa faktor pendukung yang memperlancar efektivitas program bantuan pangan non-tunai (BPNT) di desa Panangkalaan Hulu, seperti kerja sama antara pihak terkait, mayoritas penerima bantuan tergolong tepat sasaran, dan adanya komitmen pemerintah. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat, yaitu masih ada penerima yang sudah mampu, adanya keterlambatan penyaluran, kurangnya sosialisasi, dan kurangnya pengawasan.

Untuk meningkatkan efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Panangkalaan Hulu, disarankan agar Dinas Sosial melakukan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara berkala, minimal setiap tiga bulan sekali, dengan melibatkan tim verifikasi berbasis wilayah yang terdiri dari perangkat desa dan tokoh masyarakat, serta memanfaatkan teknologi digital guna mempercepat validitas dan akurasi data. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Amuntai Utara diharapkan memperkuat koordinasi lintas unit—antara Dinas Sosial, bank penyalur, dan pemerintah desa melalui forum bulanan dan sistem berbagi data terpadu, agar temuan data tidak akurat dapat segera ditindaklanjuti dengan prosedur yang jelas dan terstruktur. Pemerintah Desa Panangkalaan Hulu perlu aktif melakukan sosialisasi program BPNT melalui berbagai media informasi seperti pengumuman balai desa, poster, pengeras suara keliling, dan forum RT, khususnya menjangkau warga lansia dan kelompok rentan. Selain itu, kunjungan rutin ke e-Warong perlu dijadwalkan untuk memastikan distribusi bantuan sesuai prosedur. Di sisi lain, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap kegiatan sosialisasi, serta berperan dalam menyebarluaskan informasi kepada tetangga yang belum paham prosedur. Pemahaman kolektif tentang tujuan dan sasaran program akan mendorong kesadaran bersama bahwa bantuan BPNT ditujukan khusus bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Dengan sinergi antarinstansi dan partisipasi masyarakat, efektivitas program diharapkan dapat meningkat dan berjalan secara adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Y., 2019. *Efektivitas Kepatuhan: Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pekerja Sektor Informal di Kota Makassar*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.

Anonim, 2017. *Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.



Anonim, 2019. *Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

Ekasari, R., 2019. *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Kepanjen: Tim AE.

Hardani, et al., 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Hasanah, 2024. *Efektivitas Program Bantuan Pangan Non-Tunai Berupa Cadangan Pangan Pemerintah dalam Rangka Pemberian Bantuan Pangan di Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong*. Amuntai: STIA Amuntai.

Ismayani, N. et al., 2021. *Kualitas Pelayanan Publik*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

Kamaruzzaman, 2016. *Bimbingan Konseling*. Pontianak: Pustaka Rumah Aloy.

Karsono, 2024. *Strategi Efektivitas Kerja Aparatur*. Yogyakarta: Selat Media Partners.

Nashar, 2020. *Kualitas Pelayanan Akan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*. Kadur Pamekasan: Duta Media Publishing.

Rahmi, Y. & Kusuma, T.S., 2020. *Ilmu Bahan Makanan*. Malang: UB Press.

Rizik, M. et al., 2024. *Monograf Keinovatifan Kiai dalam Mewujudkan Efektivitas Pesantren Khalafiah*. Riau: DOTPLUS Publisher.

Saputera & Setyowati, E.D.P., 2024. *Penerapan Aplikasi Riset Operasional untuk Agroindustri*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Sawir, M., 2020. *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Sopian, A., 2024. *Evaluasi Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Madrasah: Tinjauan Praktis, Teori, Strategi, dan Implementasi*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.

Suarti, B., 2024. *Pangan Fungsional dan Bahan Penyegar*. Medan: Umsu Press.

Sugiyono, 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Thalia, W., 2020. *Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Tim Penyusun, 2022. *Pedoman Penyusun dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1)*. Amuntai: STIA Amuntai.